

DJAKARTA, 8 September 1965.-

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat :

surat Kepala Inspektorat S.M.P. Direktorat Pendidikan Umum tanggal 19 Agustus 1965 No. PSIP/224/S.K. T.U. 65 tentang usul penambahan perluasan S.M.P. Negeri tahun ajaran 1965 / 1966.

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi bertambah besarnya kebutuhan masyarakat yang bertudjuan melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengajaran yang diberikan disekolah rendah serta sebagai tempat persiapan bagi pendidikan dan pengajaran menengah tingkat atas, baik umum maupun kedjuruan, perlu dibuka beberapa buah S.M.P. Negeri di beberapa tempat;
- b. bahwa S.M.P. 2 Negeri yang telah terlampau besar, sehingga penyelenggaraan pengajaran tidak dapat berjalan lancar, dipandang perlu dipetjah menjadi dua atau tiga buah sekolah Negeri yang masing-masing berdiri sendiri;
- c. bahwa S.M.P. 2 Swasta yang telah memenuhi syarat-syarat minimal sebagai sekolah Negeri dan yang sesuai dengan rencana penjabaran sekolah-sekolah dari Departemen P.D. dan selanjutnya di-negerikan menjadi S.M.P. 2 Negeri;
- d. bahwa Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Yayasan atau Pemerintah Daerah setempat menjanggupi untuk memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan atau perluasan sekolah selanjutnya;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu menambah pembukaan, pemetjahan dan penegerian S.M.P. tahun ajaran 1965 / 1966.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 31 dan 32 tentang hak Warga-Negara mendapat pendidikan dan pengajaran;
2. Undang-undang No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah lanjutan Negeri dan peraturan tentang pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai penyelenggaraan sekolah Negeri;
3. Undang-undang No. 4 tahun 1950 jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah-sekolah;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 24 Januari No. 2512/Kab. tentang penetapan nama-nama Sekolah Rendah dan Sekolah Lanjutan selanjutnya;
5. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tanggal 23 Pebruari 1963 No. 13/1963 tentang perubahan nama " Sekolah Rakyat 6 tahun " menjadi " Sekolah Dasar ";
6. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tanggal 25 April 1947 No. 38880/S jo. 1959 No. 125409/S. tentang peraturan umum Ujian Masuk dan Ujian Penghabisan Sekolah Lanjutan Negeri;
7. Rencana Departemen P.D. dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengajaran;
8. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. No. 92/1964 tanggal 22 Agustus 1964 tentang wewenang Direktorat Pendidikan Umum.-

M. N. U. S. K. A. A. :

Menetapkan:

- Pertama** : membuka " Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Negeri ", selanjutnya disingkat S.M.P. Negeri, ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ke-dua** : petjah S.M.P. Negeri, ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran surat keputusan ini menjadi dua atau tiga buah sekolah yang masing-masing berdiri sendiri, baik organisatoris, administratif maupun dibidang teknik pendidikan;
- Ke-tiga** : menegerikan S.M.P. Swasta ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran surat keputusan ini menjadi S.M.P. Negeri setempat;
- Ke-empat** : terhadap pasal-pasal "Pertama", "Kedua" dan "Ketiga" ditetapkan ketentuan sebagai berikut :
- la. selama dan sekedar Pemerintah c.q. Departemen P.D. dan K. belum dapat menjedikan,

- 1a. selama dan sesudah Pemerintah c.q. Departemen P.D. dan K. belum dapat menyediakan, maka gedung, halaman sekolah, meubiler dan alat-alat perlengkapan lainnya dijamin dan ditanggung oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat;
- b. segala penagihan-penagihan yang bersifat keperdataan, termasuk perdijadian hutang-piutang yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan hingga dikeluarkannya surat keputusan ini, tetap menjadi tanggungan Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- 2a. perumahan guru-guru dijamin atau disediakan dengan tjara yang layak oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat sehingga merupakan keringanan bagi guru-guru yang bersangkutan;
- b. sewa rumah atau hotel disesuaikan dengan peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku untuk itu;
3. Kepala Sekolah atau guru yang diserahi pimpinan ditunjuk oleh Departemen P.D. dan K.;
4. terhadap sekolah-sekolah yang dinegerikan, khususnya terhadap tenaga pengadjar, pegawai dan murid-murid dikenakan ketentuan-ketentuan tentang pengadjar, pegawai dan murid-murid Negeri dengan tjatatan, bahwa bagi yang tidak memenuhi syarat penjalurannya menjadi tanggung-djawab Panitia atau Jajasan atau pengambil inisiatif dari Sekolah yang bersangkutan;
5. khusus bagi murid-murid yang diterima dikelas I hanyalah yang lulus ujian masuk S.M.P. Negeri dan penempatan murid-murid lainnya diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah dengan petunjuk-petunjuk Inspeksi Daerah S.M.P. yang bersangkutan;
- 6a. tiap-tiap kelas terdiri atas sekurang-kurangnya 20 orang murid dan sebanyak-banyaknya 40 orang murid;
- b. tambahan kelas, baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun-tahun berikutnya, harus seizin Kepala Inspeksi Daerah S.M.P.;

Ke-lima : jika dalam syarat-syarat tersebut diatas ternyata tidak dipenuhi oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan, maka kiranya sewaktu-waktu Pemerintah dalam keadaan terpaksa akan dapat menarik kembali pengesahannya sebagai Sekolah Negeri atau menghentikan untuk selanjutnya penerimaan murid dikelas I;

Ke-enam : biaya penyelenggaraan berhubung dengan dikeluarkannya surat keputusan ini sekedar untuk tahun 1965 dibebankan pada pasal 11 B.7.4. dari Anggaran Pendapatan pada Departemen P.D. dan K. tahun 1965, yaitu biaya yang tersedia untuk S.M.P., dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu;

Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1965.

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Atas nama Menteri :
Kepala Direktorat Pendidikan Umum,



Idris H.T. Hutapea).-

Salinan surat keputusan ini dibuat untuk :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta.
3. Departemen Urusan Pendeputan, Pembiajaan dan Pengawasan (P.P.P.) di Djakarta.
4. Biro Urusan Pembiajaan Negara Departemen P.P.P. di Djakarta.
5. Departemen Urusan Anggaran Negara di Djakarta.
6. Biro Research Penjusunan dan Penjelenggaraan Anggaran Negara Dept. Urusan Anggaran Negara di Djakarta.
7. Biro Research Penjusunan dan Penjelenggaraan Anggaran Negara, Bagian 6 E Departemen Urusan Anggaran Negara di Djakarta.
8. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No. 132 di Djakarta.
9. Djawatan Gedung2 Negara Pusat, Departemen P.U. dan T. Kramat No. 63 di Djakarta (5 ex.
10. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djl. Dr. Sutomo 8 di Djakarta (5 ex.
11. D.P.R. - G.R. "Komisi G" (Pendidikan) di Djakarta (10 expl.)
12. Kantor Bendahara Negara di :
Medan, Pakanbaru, Padang, Palembang, Tandjung Karang/Teluk-Betung, Djakarta,
Bandung, Jogjakarta, Semarang, Palangkaraja, Samarinda, Ambon.
13. Walikota di : Medan, Djakarta, Bandung.
14. Kepala Daerah tingkat I di :
Medan, Pakanbaru, Padang, Tandjung Karang/Teluk-Betung, Djakarta,
Bandung, Jogjakarta, Semarang, Palangkaraja, Samarinda, Ambon.
15. Kepala Daerah tingkat II di :

Medan	, Kabupaten Deli-Serdang	, Sumatra - Utara.
Rantau - Prapat	, " Labuhan - Batu	, Sumatra - Utara.
Tarutung	, " Tapanuli- Utara	, Sumatra - Utara.
Sibolga	, " Tapanuli- Tengah	, Sumatra - Utara.
Padangsidempuan	, " Tapanuli- Selatan	, Sumatra - Utara.
Kabandjahe	, " Karo	, Sumatra - Utara.
Sidikalang	, " Dairi	, Sumatra - Utara.
Pariaman	, " Padang/Pariaman	, Sumatra - Barat.
Solo k	, " Solo k	, Sumatra - Barat.
Painan	, " Pesisir-Selatan	, Sumatra - Barat.
Pajakumbuh	, " Limapuluh Koto	, Sumatra - Barat.
Bukittinggi	, " Agam	, Sumatra - Barat.
Rengat	, " Indragiri	, Riau.
Bangkinang	, " Kampar	, Riau.
Bengkalis	, " Bengkalis	, Riau.
Teluk-Betung	, " Lampung- Selatan	, Lampung.
Djakarta	, " Djakarta - Utara	, Djakarta - Raya.
Sukabumi	, " Sukabumi	, Jawa - Barat.
Bandung	, " Bandung	, Jawa - Barat.
Sumedang	, " Sumedang	, Jawa - Barat.
Tasikmalaja	, " Tasikmalaja	, Jawa - Barat.
Tjiamis	, " Tjiamis	, Jawa - Barat.
Purwakarta	, " Purwakarta	, Jawa - Barat.
Bekasi	, " Bekasi	, Jawa - Barat.
Karawang	, " Karawang	, Jawa - Barat.
Madjalengka	, " Madjalengka	, Jawa - Barat.
Tjirebon	, " Tjirebon	, Jawa - Barat.
Bantul	, " Bantul	, Jogjakarta.
Sleman	, " Sleman	, Jogjakarta.
Klaten	, " Klaten	, Jawa - Tengah.
Buntok	, " Barito - Selatan	, Kalimantan-Tengah.
Sampit	, " Kotawaringin-Timur	, Kalimantan-Tengah.
Samarinda	, " Kutai	, Kalimantan-Timur.
Tual	, " Maluku - Tenggara	, Maluku.

- . Djawatan P.U. dan T. Daerah tingkat I di :
Medan, Pakanbaru, Padang, Tandjung Karang/Teluk-Betung, Djakarta, Bandung,
Jogjakarta, Semarang, Palangkaraja, Samarinda, Ambon.
- . Djawatan P.U. dan T. Daerah tingkat II di:

Medan	, Kabupaten Deli - Serdang	, Sumatra - Utara.
Rantau - Prapat	, " Labuhan - Batu	, Sumatra - Utara.
Tarutung	, " Tapanuli-Utara	, Sumatra - Utara.
Sibolga	, " Tapanuli-Tengah	, Sumatra - Utara.
Padangsidempuan	, " Tapanuli-Selatan	, Sumatra - Utara.
Kabandjahe	, " Karo	, Sumatra - Utara.
Sidikalang	, " Dairi	, Sumatra - Utara.
Pariaman	, " Padang/Pariaman	, Sumatra - Barat.
Solo k	, " Solo k	, Sumatra - Barat.
Painan	, " Pesisir-Selatan	, Sumatra - Barat.

Pajakumbuh

Pajakumbuh	, Kabupaten Limapuluh Koto	, Sumatra - Barat.
Bukittinggi	, " Agam	, Sumatra - Barat.
Rengat	, " Indragiri	, Riau.
Bangkinang	, " Kampar	, Riau.
Bengkalis	, " Bengkalis	, Riau.
Teluk-Betung	, " Lampung-Selatan	, Lampung.
Djakarta	, " Djakarta - Utara	, Djakarta - Raya.
Sukabumi	, " Sukabumi	, Jawa - Barat.
Bandung	, " Bandung	, Jawa - Barat.
Sumedang	, " Sumedang	, Jawa - Barat.
Tasikmalaja	, " Tasikmalaja	, Jawa - Barat.
Tjiamis	, " Tjiamis	, Jawa - Barat.
Purwakarta	, " Purwakarta	, Jawa - Barat.
Karawang	, " Karawang	, Jawa - Barat.
Bekasi	, " Bekasi	, Jawa - Barat.
Medjalangka	, " Medjalangka	, Jawa - Barat.
Tjirebon	, " Tjirebon	, Jawa - Barat.
Bantul	, " Bantul	, Jogjakarta.
Sleman	, " Sleman	, Jogjakarta.
Klaten	, " Klaten	, Jawa - Tengah.
Buntok	, " Barito - Selatan	, Kalimantan - Tengah.
Sampit	, " Kotawaringin-Timur	, Kalimantan - Tengah.
Samarinda	, " Kutai	, Kalimantan - Timur.
Tual	, " Maluku - Tenggara	, Maluku.

18. Kepala Perwakilan Departemen P.D. dan K. Daerah tingkat I di :

Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Tandjung Karang/Teluk - Betung, Djakarta, Bandung, Jogjakarta, Semarang, Palangkaraja, Samarinda, Ambon.

19. Kepala Inspeksi Daerah S.M.P. Daerah tingkat I di :

Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Tandjung Karang/Teluk - Betung, Djakarta, Bandung, Jogjakarta, Semarang, Palangkaraja, Samarinda, Ambon.

20. Kepala / Pemimpin :

1. S.M.P. Negeri I di Medan, Kotapradja Medan, Kab. Deli-Serdang, Sumatra - Utara.
2. S.M.P. Negeri VI di Medan, Kotapradja Medan, Kab. Deli-Serdang, Sumatra - Utara.
3. S.M.P. Negeri VIII di Medan, Kotapradja Medan, Kab. Deli-Serdang, Sumatra - Utara.
4. S.M.P. Negeri IX di Medan, Kotapradja Medan, Kab. Deli-Serdang, Sumatra - Utara.
5. S.M.P. Negeri di Delitua, Ketj. Delitua, Kab. Deli-Serdang, Sumatra - Utara.
6. S.M.P. Negeri I di Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan-Batu, Sumatra - Utara.
7. S.M.P. Negeri II di Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan-Batu, Sumatra - Utara.
8. S.M.P. Negeri di Marbau, Ketj. Marbau, Kab. Labuhan - Batu, Sumatra - Utara.
9. S.M.P. Negeri I di Pangururan, Ketj. Pangururan, Kabupaten Tapanuli - Utara, Sumatra - Utara.
10. S.M.P. Negeri II di Pangururan, Ketj. Pangururan, Kabupaten Tapanuli - Utara, Sumatra - Utara.
11. S.M.P. Negeri I di Siborong-borong, Ketj. Siborong-borong, Kab. Tapanuli-Utara, Sumatra - Utara.
12. S.M.P. Negeri II di Siborong-borong, Ketj. Siborong-borong, Kab. Tapanuli-Utara, Sumatra - Utara.
13. S.M.P. Negeri di Parlilitan, Ketj. Parlilitan, Kabupaten Tapanuli - Utara, Sumatra - Utara.
14. S.M.P. Negeri di Sigumpar, Ketj. Silaen, Kab. Tapanuli-Utara, Sumatra - Utara.
15. S.M.P. Negeri di Pansurbatu, Ketj. Adianketting, Kabupaten Tapanuli - Utara, Sumatra - Utara.
16. S.M.P. Negeri di Tukka, Ketj. Sibolga, Kab. Tapanuli-Tengah, Sumatra - Utara.
17. S.M.P. Negeri III di Padangsidempuan, Ketj. Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli - Selatan, Sumatra - Utara.
18. S.M.P. Negeri IV di Padangsidempuan, Ketj. Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli - Selatan, Sumatra - Utara.
19. S.M.P. Negeri di Nagasaribu, Ketj. Padangbolak, Kabupaten Tapanuli - Selatan, Sumatra - Utara.
20. S.M.P. Negeri di Pasarmatanggor, Ketj. Sosopan, Kabupaten Tapanuli - Selatan, Sumatra - Utara.
21. S.M.P. Negeri di Natal, Ketj. Natal, Kab. Tapanuli-Selatan, Sumatra - Utara.
22. S.M.P. Negeri di Binanga, Ketj. Barumun-Tengah, Kabupaten Tapanuli - Selatan, Sumatra - Utara.
23. S.M.P. Negeri di Tigaserongkai, Ketj. Simpang Empat, Kab. Karo, Sumatra-Utara.
24. S.M.P. Negeri I di Sidikalang, Ketj. Sidikalang, Kab. Dairi, Sumatra-Utara.
25. S.M.P. Negeri II di Sidikalang, Ketj. Sidikalang, Kab. Dairi, Sumatra-Utara.
26. S.M.P. Negeri di Bakaldjulu, Ketj. Siempatnempu, Kab. Dairi, Sumatra-Utara.
27. S.M.P. Negeri I di Pariaman, Ketj. Pariaman, Kabupaten Padang/Pariaman, Sumatra - Barat.
28. S.M.P. Negeri

28. S.M.P. Negeri III di Pariaman, Ketj. Pariaman, Kabupaten Padang/Pariaman, Sumatra - Barat.
 29. S.M.P. Negeri I di Muaralabuh, Ketj. Sungai Pagu, Kab. Solok, Sumatra - Barat.
 30. S.M.P. Negeri II di Muaralabuh, Ketj. Sungai Pagu, Kab. Solok, Sumatra - Barat.
 31. S.M.P. Negeri di Kambang, Ketj. Lenggajang, Kab. Pesisir-Selatan, Sumatra-Barat.
 32. S.M.P. Negeri di Situdjuh, Ketj. Luha-k, Kab. Lempuluh Koto, Sumatra-Barat.
 33. S.M.P. Negeri II di Lubukbasung, Ketj. Lubukbasung, Kab. Agam, Sumatra - Barat.
 34. S.M.P. Negeri di Taluk, Ketj. Kuantan-Tengah, Kab. Indragiri, Riau.
 35. S.M.P. Negeri di Benci, Kabupaten Indragiri, Riau.
 36. S.M.P. Negeri di Belalawan, Kawodanan Belalawan, Kab. Kampar, Riau.
 37. S.M.P. Negeri di Dumai, Ketj. Dumai, Kab. Bengkalis, Riau.
 38. S.M.P. Negeri di Gedongtataan, Ketj. Gedongtataan, Kab. Lampung-Selatan, Lampung.
 39. S.M.P. Negeri LIV di Kompleks Remdam Kobakaran, Djl. Kotapang Djakarta, Kabupaten Djakarta-Utara, D.C.I. Djakarta - Raya.
 40. S.M.P. Negeri di Sukabumi, Ketj. Sukabumi, Kotapradja Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Djawa - Barat.
 41. S.M.P. Negeri di Tjibadak, Ketj. Tjibadak, Kab. Sukabumi, Djawa - Barat.
 - ✓ 42. S.M.P. Negeri di Tjitjurug, Ketj. Tjitjurug, Kab. Sukabumi, Djawa - Barat.
 43. S.M.P. Negeri I di Bandung, Kotapradja Bandung, Kab. Bandung, Djawa - Barat.
 44. S.M.P. Negeri XII di Bandung, Kotapradja Bandung, Kab. Bandung, Djawa - Barat.
 45. S.M.P. Negeri I di Tjimarhi, Ketj. Tjimarhi, Kabupaten Bandung, Djawa - Barat.
 46. S.M.P. Negeri di Tjisarua, Ketj. Tjisarua, Kab. Bandung, Djawa - Barat.
 47. S.M.P. Negeri di Situradja, Ketj. Situradja, Kab. Sumedang, Djawa - Barat.
 48. S.M.P. Negeri di Darmaradja, Ketj. Darmaradja, Kab. Sumedang, Djawa - Barat.
 49. S.M.P. Negeri di Manondjaja, Ketj. Manondjaja, Kab. Tasikmalaja, Djawa - Barat.
 50. S.M.P. Negeri di Tjineam, Ketj. Tjineam, Kab. Tasikmalaja, Djawa - Barat.
 51. S.M.P. Negeri I di Tjiamis, Ketj. Tjiamis, Kabupaten Tjiamis, Djawa - Barat.
 52. S.M.P. Negeri di Selakaria, Ketj. Radjadesa, Kab. Tjiamis, Djawa - Barat.
 53. S.M.P. Negeri di Kowali, Ketj. Kowali, Kabupaten Tjiamis, Djawa - Barat.
 54. S.M.P. Negeri di Buniseuri, Kabupaten Tjiamis, Djawa - Barat.
 55. S.M.P. Negeri di Bandjar, Ketj. Bandjar, Kabupaten Tjiamis, Djawa-Barat.
 56. S.M.P. Negeri di Pamritjan, Ketj. Pamritjan, Kab. Tjiamis, Djawa-Barat.
 57. S.M.P. Negeri di Pangandaran, Ketj. Pangandaran, Kab. Tjiamis, Djawa-Barat.
 58. S.M.P. Negeri di Padaherang, Ketj. Padaherang, Kab. Tjiamis, Djawa-Barat.
 59. S.M.P. Negeri di Purwakarta, Ketj. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Djawa - Barat.
 60. S.M.P. Negeri di Manajasa, Ketj. Manajasa, Kab. Purwakarta, Djawa - Barat.
 61. S.M.P. Negeri I di Subanang, Ketj. Subanang, Kab. Purwakarta, Djawa-Barat.
 62. S.M.P. Negeri di Pegadenbaru, Ketj. Pegadenbaru, Kab. Purwakarta, Djawa-Barat.
 63. S.M.P. Negeri I di Karawang, Ketj. Karawang, Kabupaten Karawang, Djawa-Barat.
 64. S.M.P. Negeri di Tjikampek, Ketj. Tjikampek, Kabupaten Karawang, Djawa-Barat.
 65. S.M.P. Negeri di Tjilamaja, Ketj. Tjilamaja, Kabupaten Karawang, Djawa-Barat.
 66. S.M.P. Negeri di Tjikarang, Ketj. Tjikarang, Kabupaten Bekasi, Djawa-Barat.
 67. S.M.P. Negeri di Djatiwangi, Ketj. Djatiwangi, Kab. Madjalengka, Djawa-Barat.
 68. S.M.P. Negeri di Kadipaten, Ketj. Kadipaten, Kab. Madjalengka, Djawa-Barat.
 69. S.M.P. Negeri I di Madjalengka, Kabupaten Madjalengka, Djawa - Barat.
 70. S.M.P. Negeri II di Madjalengka, Kabupaten Madjalengka, Djawa - Barat.
 71. S.M.P. Negeri di Ardjawinangun, Ketj. Ardjawinangun, Kab. Tjirebon, Djawa-Barat.
 72. S.M.P. Negeri di Gegesik, Ketj. Gegesik, Kabupaten Tjirebon, Djawa - Barat.
 73. S.M.P. Negeri di Tjiledug, Ketj. Tjiledug, Kabupaten Tjirebon, Djawa - Barat.
 74. S.M.P. Negeri di Losari, Ketj. Losari, Kabupaten Tjirebon, Djawa - Barat.
 75. S.M.P. Negeri di Gondowulung, Ketj. Gondowulung, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta.
 76. S.M.P. Negeri di Donohardjo, Ketj. Ngaglik, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta.
 77. S.M.P. Negeri di Manisrenggo, Ketj. Manisrenggo, Kab. Klaten, Djawa - Tengah.
 78. S.M.P. Negeri di Tjepet, Ketj. Tjepet, Kab. Klaten, Djawa - Tengah.
 79. S.M.P. Negeri di Polanhardjo, Ketj. Polanhardjo, Kab. Klaten, Djawa - Tengah.
 80. S.M.P. Negeri di Gantiwarno, Ketj. Gantiwarno, Kab. Klaten, Djawa - Tengah.
 81. S.M.P. Negeri di Teluk-Betung, Ketj. Mengkotip, Kabupaten Barito-Selatan, Kalimantan - Tengah.
 82. S.M.P. Negeri di Tumbang Samba, Ketj. Katingan-Tengah, Kab. Kotawaringin-Timur, Kalimantan - Tengah.
 83. S.M.P. Negeri di Tenggara, Kabupaten Kutai, Kalimantan - Timur.
 84. S.M.P. Negeri di Loah Kulu, Ketj. Loah Kulu, Kab. Kutai, Kalimantan - Timur.
 85. S.M.P. Negeri di Ramean Lorat, Wilajah Tanimbar-Utara, Kab. Maluku-Tenggara, Maluku.
21. Direktorat Pendidikan Agama Departemen Agama, Djl. Thamrin di Djakarta (5 expl.)
22. Departemen Olah-Raga, Djl. Djendral Sudirman di Djakarta (5 expl.)
23. Departemen P.D. dan K.

23. Departemen P.D.dan K. Djl.Tjilatjap No.4 di Djakarta:
- a. Pembantu Khusus Menteri Koordinator Kompartimen Pendidikan.
 - b. Pembantu Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.
 - c. Biro Urusan Pemuda.
 - d. Biro Hubungan Masyarakat:
 1. Seksi Statistik (3 expl.)
 2. Seksi Dokumentasi (3 expl.)
 3. Seksi Publikasi (3 expl. untuk disiarkan).
 - e. Biro Hukum (10 expl.)
 - f. Biro Pengawas Keuangan.
 - g. Biro Keuangan (10 expl.)
 - h. Biro Urusan Sokongan .
 - i. Biro Administrasi Pegawai,C.I (5 expl.)
 - j. Biro Kesedjahteraan Pegawai.
 - k. Biro Urusan Dalam dan Karjawan.
 - l. Sekretaris Pembantu Menteri Bidang Tehnis Pendidikan.
 - m. Sekretaris Pembantu Menteri Bidang Administrasi Umum.
 - n. Sekretaris Pembantu Menteri Bidang Kebudayaan.
 - o. Sekretaris Pembantu Menteri Bidang Khusus.
24. Biro Perbekalan Departemen P.D.dan K. Djl.Nusantara 19 di Djakarta.
25. Biro Bangunan Departemen P.D.dan K. Djl.Nusantara 19 di Djakarta.
26. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Bangunan2 Sekolah Departemen P.D.dan K. Djl. Taman Sari 124 di Bandung (5 expl.)
27. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Dept.P.D.dan K. Djl.Hanglekir II di Kebajoran - Baru (5 expl.)
28. Direktorat Pendidikan Kedjuruan Dept.P.D.dan K. Djl.Hanglekir II di Kebajoran - Baru (3 expl.)
29. Direktorat Pendidikan Teknologi Dept.P.D.dan K. Djl.Hanglekir II di Kebajoran - Baru (3 expl.)
30. Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Dept.P.D.dan K. Djl.Hanglekir II di Kebajoran - Baru (3 expl.)
31. Direktorat Pendidikan Umum Dept.P.D.dan K. Djl.Hanglekir II di Kebajoran - Baru :
- a. Inspektorat S.M.A.
 - b. Inspektorat S.M.P. :
 1. Kepala Inspektorat S.M.P.
 2. Urusan Sekolah dan Kursus2.
 3. Urusan Perentjanaan Guru dan Tenaga.
 4. Urusan Perentjanaan Keuangan dan Peralatan.
 5. Urusan Pembimbingan, Penjuluhan dan Pengawasan.
 - c. Inspektorat Tata - Laksana:
 1. Kepala Inspektorat Tata-Laksana.
 2. Urusan Penerangan, Statistik, Perpustakaan, Dokumentasi dan Perluasan Sekolah (5 expl.)
 3. Urusan Rumah - Tangga.
 4. Urusan Keuangan.
 5. Urusan Kesedjahteraan Pegawai.
 6. Urusan Penjelenggaraan.
 7. Urusan Kepegawaian.

32. A r s i p.-

Lampiran I Surat Keputusan Menteri P.D. dan K.
tanggal 8 September 1965
No. 101/S.K./B/III/65-66.
Tentang : Pembukaan S.M.P. Negeri
tahun ajaran 1965/1966.-

No.	Nama dan tempat sekolah yang dibuka	! Djml. ! ! kelas !	K e t e r a n g a n
1.	S.M.P. Negeri di Gedongtataan, Ketjaman Gedongtataan, Kabupaten Lampung - Selatan, Daerah tingkat I L a m p u n g.	3	Diselenggarakan pada waktu pagi hari.
2.	S.M.P. Negeri LIV di Complex Pemadam Kebakaran, Djl. Ketapang, Djakarta, Kabupaten Djakarta - Utara, D.C.I. Djakarta - Raya.	6	Diselenggarakan pada waktu sore hari.
3.	S.M.P. Negeri di Teluk Betung, Ketjaman Mengkatip, Kabupaten Barito - Selatan, Daerah tingkat I Kalimantan-Tengah.	4	Diselenggarakan pada waktu pagi hari.

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Atas nama Menteri:
Kepala Direktorat Pendidikan Umum,



Idris N.T. Hutapea).-